

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT.**

(Nama: Agnes Jaziandra, BP: 07140142, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
70 + vi halaman, Tahun 2012)

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah, namun hubungannya dengan konstituen dan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah tidak banyak diatur secara formal pada level strategis (UUD dan peraturan perundang-undangan). Antara DPD dan masyarakat di daerah secara politik mempunyai keterikatan yang sangat dalam, artinya keduanya saling membutuhkan untuk difasilitasi kepentingannya, yang mana daerah menghendaki aspirasinya diperjuangkan di pusat melalui wakilnya yaitu anggota-anggota DPD, tetapi secara legal formal belum diatur mekanisme hukum yang akan ditempuh apabila wakil daerah tersebut berhasil atau gagal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah di pusat. Tentunya hal tersebut perlu disorot lebih jauh lagi, karena pembangunan daerah selama ini dibebankan kepada pemerintah daerah. Namun pasca reformasi, DPD juga ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan otonomi daerah walaupun dalam tempat, skala, dan proses yang berbeda dalam hal ini pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersikap deskriptif sedangkan data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian penulis sebagai berikut: 1. Mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terkait UU Otonomi Daerah dibagi menjadi tiga. Pertama, proses penyerapan aspirasi masyarakat. DPD melakukan penyerapan aspirasi secara langsung dan tidak langsung. Kedua, proses penyaluran aspirasi. Aspirasi yang tadinya ditampung dibuat dalam laporan tertulis dengan sebelumnya mengidentifikasi masalah-masalah tadi untuk kemudian dilakukan pengkategorian. Terakhir, proses penyampaian hasil pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bahan pertimbangan. 2. Peranan DPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait UU Otonomi Daerah sangat strategis karena DPD sebagai lembaga negara berhak turun langsung dari level paling rendah dan juga terlibat dalam pemberian rekomendasi. 3. Kendala yang dialami DPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait UU Otonomi Daerah adalah peran dan fungsi DPD yang dimarjinalkan dalam ketentuan konstitusi, pola kerja sama antara DPD dengan lembaga pemerintahan daerah terkait yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang dan masalah pada level internal lembaga pemerintahan daerah itu sendiri.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada arwah junjungan umat Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan dengan tulus kepada kedua orang tua, Ayahanda Jasral dan Ibunda Pepmeili Desri, SE., yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menempuh pendidikan dasar hingga jenjang perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Di samping itu, juga kepada Ibu Yunita Syofyan, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Alsyam, SH., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga, skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi penulis untuk menggapai cita-cita dan impian di masa depan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dekan, Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH; Wakil Dekan I, Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM; Wakil Dekan II, Bapak Frenaddin Adegustara, SH. MS; Wakil Dekan III, Bapak Dr. Kurniawarman, SH. MH;

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dian Bakti Setiawan SH, MH dan Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara, Ibu Delfina Gusman, SH. MH;
3. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
4. Wakil Ketua II Komite I DPD RI, Bapak H. Alirman Sori, SH., M.Hum., MM., Anggota Komite II DPD RI, Bapak Parlindungan Purba, SH., MM., serta narasumber lain yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik (Didit Aprilio, Gafary Jazed, M. Afif Taimullah) beserta keluarga besar penulis dan teristimewa kepada Myveela Rustam (untuk bahagia dan duka yang telah diberikan). Selanjutnya kepada teman-teman, *my best friends* keluarga *Unsep Family*: Tante Susia Suzana, Windy Rahmadi, Ferry Nanda, Novas Hegar Agussalim, SH, Rinto Amarta Wiguna SH, Ruslan Ryvany SH, Oky Saputra SH, Putra Mahdiyan SH, Zulpi Eka Putra SH, Mario Yusuf SH, Hendrix Yonaz, SH, Josep Hendri, Wihen Yuhandra, Mina Mahwu, Susan Amalia, Novas Vania Agussalim, S.Si, Restika Dewinta, SE. Briptu Antonio Fransisca, Briptu Febriwan Siregar, Ramadhani, Roby Ernof, M. Sandi Abdillah, Erick Marino, Randy Irwahyudi, Sherly Saputri SH, Ayu Yustisia SH, Mega Rahmi Putri SH, Febry Ledi SH, M. Rafqi Sidiq, Nurul Pratama, SH, Havid Mizain, SH, Resi Rahayu, SH, Dika, Da Dian, Da Yose, Da Pendi, Da Riki, Bang Riko (terima kasih selalu ada dalam suka dan duka), serta semua teman-teman yang maaf tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan dorongan motivasi dan

pengalaman paling berharga selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tapi juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Padang, Juni 2012
Penulis,

Agnes Jaziandra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Legislatif di Indonesia	14
1. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah	15
2. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah	18
3. Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Daerah	22
4. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah	23
B. Tinjauan Umum Otonomi Daerah	25
1. Pengertian dan Makna Konsep Otonomi Daerah	27
2. Tujuan Otonomi Daerah	31
3. Asas-Asas Otonomi Daerah	32

C. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah	34
1. Pengertian dan Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah	35
2. Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah	38
3. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Terkait Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat	43
B. Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Barat	55
C. Kendala yang Dihadapi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terkait Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN